

IKHTIAR PREDIKAT LOMBOK TIMUR MENJADI KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) MADYA

Suherman HM. Sahir*

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa: "Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak"

Saat ini Kabupaten Lombok Timur terus berupaya mengejar target untuk memenuhi standar untuk menjadi daerah layak anak secara penuh. Sebelumnya Lombok Timur telah menyandang predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama dan tahun ini pemerintah daerah sedang berupaya untuk menaikkan predikat KLA yang disandang oleh Lombok Timur menjadi KLA tingkat Madya.

Upaya untuk mengejar target KLA Madya tentunya tidak mudah karena masih terdapat beberapa persoalan yang harus dipenuhi untuk menaikkan predikat Lombok Timur menjadi KLA Madya, mulai dari aspek fisik, psikologi, dan sosial. Selain itu juga masih terdapat beberapa isu sosial yang harus diselesaikan untuk memenuhi persyaratan kenaikan predikat Lombok Timur sebagai KLA, yaitu isu kekerasan anak, pernikahan anak, hingga pemenuhan hak-hak lainnya.

Komitmen pemerintah daerah dalam upaya mengejar target kenaikan predikat Lombok Timur sebagai KLA Madya terlihat jelas dari beberapa regulasi kebijakan untuk memperkuat hal tersebut. Salah satu contoh dari kebijakan regulasi tersebut adalah adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga telah menginstruksikan adanya Peraturan Desa

(PERDES) terkait dengan pencegahan perkawinan anak dimana, hal ini telah terealisasi di 239 desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Tidak itu saja, komitmen pemerintah daerah Lombok Timur saat ini telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang memberikan penghormatan dan perlindungan bagi anak melalui Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak.

Tidak hanya melalui kebijakan regulasi saja komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah namun, keberadaan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Pencegah Penurunan Stunting (TPPS) serta UPTD PPA merupakan implementasi dari komitmen pemerintah daerah terhadap predikat Lombok Timur sebagai daerah yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Jangan Hanya Mengejar Predikat

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, terdapat 1.441 jumlah ibu hamil yang usianya di bawah 19 tahun pada 2023, kemudian terdapat 69 kasus perkawinan anak yang dilaporkan di UPTD PPA Lombok Timur serta terjadi 162 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun yang sama.

Dari data-data tersebut predikat Lombok Timur sebagai KLA yang telah dilengkapi dengan beberapa kebijakan regulasi belum dapat memberikan jaminan anak-anak di Lombok Timur dapat merasakan hidup dengan nyaman. Jadi menurut penulis, seluruh stakeholder pembangunan di Lombok Timur harus serius dan tidak hanya pada tataran statemen dan regulasi saja, melainkan harus sampai pada tahap implementasi.

Kami melihat keseriusan pemerintah daerah masih masih pada keinginan mengejar target predikat KLA saja dimana, hal ini terlihat dari dukungan anggaran terkait dengan perlindungan anak hanya berkisar 1-2 persen dari keseluruhan APBD Lombok Timur. Jumlah anggaran yang terbatas tersebut digunakan untuk pemenuhan non-kebutuhan dasar, seperti program pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang. Idealnya Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat, yang bersentuhan langsung dengan anak, harus lebih kritis dalam menangani hak anak tersebut.

Komitmen pemerintah daerah harus lebih kuat dari komitmen saat ini, terutama dalam hal penganggaran dan koordinasi serta sinergitas. Hal ini sangat penting untuk memenuhi indikator-indikator yang dibutuhkan sebagai daerah yang layak anak yang meliputi meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta perlindungan khusus.

Keberadaan berbagai regulasi kebijakan harus diimbangi dengan sosialisasi yang masif kepada seluruh elemen masyarakat Lombok Timur. Meskipun seluruh desa telah memiliki perdes pencegahan perkawinan anak namun, keberadaan regulasi tersebut belum tersosialisasi sehingga, tidak heran apabila masih terjadi kasus perkawinan anak dan hal ini

tentunya bertolak belakang dari indikator yang diinginkan sebagai suatu daerah layak anak.

Didalam indikator KLA, pemenuhan hak-hak anak, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan ruang publik yang aman, menjadi fokus utama. Peningkatan kualitas sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan taman bermain ramah anak harus terus digalakkan hingga ke level desa.

Permasalahan Menuju KLA Madya

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan pada Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu dari 5 klaster utama dalam penilaian KLA, yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satu penilaian dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan adalah terkait dengan Hak Identitas.

Saat ini dari 128.111 jumlah penduduk usia 0-5 tahun di Lombok Timur pada 2023, 127.276 diantaranya telah memiliki Akta Kelahiran atau mencapai 99,35% dan masih ada sisa 835 anak yang belum memiliki Akta Kelahiran (Dirjen Dukcapil Kemendagri, 2023).

Namun untuk keberadaan Forum Anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Hal ini karena keberadaan forum anak baru hanya di tingkat daerah saja belum menyentuh pada tingkat kecamatan ataupun tingkat desa, meskipun ada namun hanya sebatas nama saja.

Keberadaan forum anak dalam penilaian KLA sangat penting mengingat forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam kegiatan pembangunan di Lombok Timur melalui berbagai kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan tersebut bermula dari program-program dalam mengakhiri kekerasan pada anak yang marak terjadi saat ini, mengembangkan bakat dan minat yang menjadi potensi tiap diri mereka, begitu juga dengan peran aktif mereka dalam mengawal proses perumusan pembangunan yang masih

minim dengan melibatkan anak. Padahal, anak juga memiliki peran dalam pembangunan sekecil apapun.

Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif masih banyak masalah yang terkait dengan tingginya kasus perkawinan pada anak. Berdasarkan data UPTD PPA Lombok Timur, pada 2023 tercatat 69 laporan perkawinan anak. Sedangkan data terkait dengan dispensasi pernikahan yang berasal dari Pengadilan Agama (PA) Selong pada periode 2018-2022, rata-rata jumlah dispensasi pernikahan adalah 54 dispensasi pernikahan. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, terdapat 1.441 jumlah ibu hamil yang usianya di bawah 19 tahun pada 2023.

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian pada Klaster Perlindungan Khusus salah satu yang menjadi masalah paling besar ialah pada masalah kekerasan yang terjadi pada anak. UPTD PPA menyebutkan pada 2023 terdapat 162 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan data SIMFONI PPA juga menyebutkan pada tahun yang sama terdapat 154 kasus yang tercatat di sistem pelaporan tersebut.

Dari 35 jumlah Puskesmas di Lombok Timur, 26 diantaranya sudah masuk dalam kriteria Puskesmas Layak Anak dan sisanya saat ini sedang diusahakan untuk mencapai kriteria tersebut. Hal ini penting dalam upaya memenuhi penilaian standarisasi KLA pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Kolaborasi dan Sinergitas

Jalan untuk mewujudkan Lombok Timur yang layak anak memang tidaklah mudah, karena masih terdapat berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Lombok Timur.

Komitmen pimpinan daerah dalam upaya mewujudkan Lombok Timur sebagai daerah yang layak anak harus didukung oleh aparatur di bawahnya dan tentunya juga harus didukung oleh kebijakan penganggaran dalam memperkuat komitmen tersebut. Selain itu, koordinasi, pengintegrasian, dan sinergitas multi pihak sangat penting untuk lebih ditingkatkan lagi.

Anak harus menjadi prioritas pembangunan demi tercapainya tujuan generasi Lombok Timur yang lebih berkualitas. Pembangunan ekonomi dan fisik memang sangat penting namun, memberikan perhatian khusus kepada kepentingan anak dalam pembangunan Lombok Timur juga harus tetap menjadi prioritas utama.

Semoga dengan segala daya upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah, predikat Lombok Timur sebagai KLA Madya dapat tercapai dan menjadi suatu pemicu dalam ikhtiar pembangunan yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak anak di Lombok Timur dapat terwujud.

Upaya untuk meraih predikat KLA Madya yang dilakukan oleh Pemda Lombok Timur juga merupakan langkah pembenahan, pemenuhan, dan mengimplementasikan hak anak dalam suatu kebijakan dan program pemerintah daerah.